

Dampak Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada *Learning Outcome* Program Studi Ilmu Komunikasi

<http://dx.doi.org/10.25008/wartaiski.v4i2.135>

Husen Mony¹, Hayu Lusianawati^{2*}, Aska Leonardi³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Jakarta
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, Jakarta Selatan 12870 - Indonesia
*e-mail korespondensi: hayu_lusianawati@usahid.ac.id

Submitted: 27/12/2021; Revised: 30/12/2021; Accepted: 31/12/2021
Accredited by Kemristekdikti No. 30/E/KPT/2019

Abstrak

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait dengan kesesuaian antara tujuan dari program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dengan *learning outcome* (LO). Ada empat kompetensi lulusan program studi S-1 Ilmu Komunikasi: aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Tujuan penelitian ini adalah: (1) memahami ekses implementasi kebijakan MBKM pada LO prodi S-1 Ilmu Komunikasi; (2) memahami pandangan dosen terkait kebijakan MBKM. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data melalui FGD dengan menghadirkan Sembilan dosen tetap prodi sebagai narasumber. Analisis data menggunakan pendekatan Creswell berupa enam tahap analisis. Temuan penelitian: Program MBKM mendukung *learning outcome* Prodi, jika diimplementasikan secara tepat. Dari aspek sikap, pada proyek kemanusiaan, mahasiswa dididik berempati dan peka atas realitas sosial melalui kegiatan-kegiatan sosial. Melalui program pertukaran pelajar-mahasiswa dapat memperoleh ilmu, sesuai Prodi atau di luar Prodi-nya. Program riset dan magang juga memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang permasalahan sosial. Keterampilan umum dapat diperoleh mahasiswa dari magang industri serta praktek kerja di bidang jurnalistik, humas, dan komunikasi pemasaran. Program magang juga dapat meningkatkan keterampilan seperti fotografi, kameramen, membuat *press release*, *copywriting*, digital PR, dan lainnya. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) program MBKM memiliki dampak yang baik dalam mendukung terwujudnya *learning aoutcome* Prodi; (2) Dosen Prodi Ilmu Komunikasi mendukung penerapan MBKM namun mereka belum memahami posisi dan peran mereka karena minimnya informasi yang diterima terkait kebijakan ini.

Kata Kunci: *learning outcome*; kampus merdeka; pendidikan membebaskan; implementasi kebijakan; merdeka belajar

Abstract

The problem that is the focus of this research is related to the suitability between the objectives of the *Merdeka Belajar Kampus Merdeka* (MBKM) program and the *learning outcome/LO* (Learning Outcomes of Graduates/CPL). There are four competencies of graduates of the S1 Communication Science Study Program, namely: aspects of attitude, knowledge, general skills, and special skills MBKM is seen as hindering the achievement of the LO. The aims of this study are: (1) to understand the excesses of implementing MBKM policies on the learning outcomes of S1 Communication Studies study program; (2) to understand the views of lecturers regarding MBKM policies. The research method used is a case study (multiple case studies), the data collection is through FGD by presenting nine resource persons/participants from permanent lecturers of Study Program. Data analysis used the Creswell approach (6 stages of analysis). As a result, the MBKM program is seen as supporting Study Program's learning outcomes, if implemented properly. From the aspect of attitude,

through humanitarian projects, students are educated to empathize and be sensitive to social realities through social activities. Through the student exchange program, students can gain knowledge, according to their study program or outside their study program. Research and internship programs also enrich students' knowledge of social issues. General skills can be obtained by students from industrial internships as well as practical work in the fields of journalism, public relations, and marketing communications. This internship program can also improve skills such as photography, cameramanship, making press releases, copywriting, digital PR, and others. The conclusions of this study are: (1) that the MBKM program has a good impact in supporting the realization of Study Program learning outcomes; (2) Lecturers of the Communication Studies Study Program support the implementation of MBKM but they do not understand their position and role due to the lack of information received regarding this policy.

Keywords: communications studies, learning outcome; freedom to learn; liberating education; implementation policy

PENDAHULUAN

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mendorong universitas untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja berbekal ilmu yang mereka peroleh. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penyikapan atas kondisi dunia kerja yang membutuhkan beragam ilmu dalam mengerjakan satu bidang kerja (*jobdesk*). Kebijakan ini juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka *link & match* antara dunia pendidikan, dunia industri, dan masa depan bangsa (Dirjendikti, 2020).

Permendikbud No. 3 Tahun 2020, merupakan landasan kebijakan MBKM. Pada pasal 18 disebutkan, beban belajar mahasiswa program sarjana (atau sarjana terapan) dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu: (1) mengikuti seluruh kegiatan akademik (masa dan beban belajar) pada prodi yang sama; dan (2) menyelesaikan masa dan beban belajar di dalam prodi untuk sebagian, dan sebagian lainnya diselesaikan di luar program studi. Peraturan tersebut memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk menghabiskan satu atau dua semester (setara dengan 40 satuan kredit semester) di luar program studinya.

Universitas Sahid Jakarta (Usahid), sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan, mengadopsi kebijakan pemerintah tersebut lewat keputusan Rektor Universitas Sahid Jakarta No. 130/USJ-01/A-50/2020 tentang Panduan Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui aturan tersebut, seluruh program studi di lingkungan Universitas Sahid wajib melaksanakan program MBKM.

Sebelum pemberlakuan program MBKM, Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi telah menyusun kurikulum sebagai aktifitas berskala empat tahunan. Proses penyusunan kurikulum itu telah mengikuti standardisasi, dengan menghadirkan *stakeholder*, seperti *user* (pihak perusahaan/industri), alumni, dosen, dan mahasiswa aktif. Namun, di tengah proses tersebut, pemerintah mengharuskan pelaksanaan MBKM. Meski ada upaya penyesuaian yang dilakukan Prodi, namun dengan keterbatasan informasi tentang MBKM, kurikulum yang ada (kurikulum 2020) masih mengacu pada pola lama.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait dengan kesesuaian antara tujuan dari program MBKM dengan *learning outcome* (Capaian Pembelajaran Lulusan). Pada kurikulum yang sudah disusun Prodi, dan masih berlaku, ada empat kompetensi lulusan Prodi S1 Ilmu Komunikasi Usahid, yaitu: aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari segi sikap, lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Usahid diharuskan bertakwa kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan serta nilai-nilai hospitalitas, dan lain-lain yang seluruhnya ada 11 kompetensi sikap.

Dari aspek pengetahuan, lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Usahid diharuskan menguasai konsep teoritis dan memiliki keterampilan Jurnalistik, Humas, dan Komunikasi Pemasaran. Sedangkan keterampilan umum yang diharapkan yaitu: mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, dan lain-lain yang seluruhnya ada sembilan keterampilan umum. Kemudian, kompetensi keterampilan khusus yang diharuskan antara lain: Menguasai konsep teori dan terampil dalam bidang Jurnalistik, Humas, dan Komunikasi

Pemasaran; Mampu mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan Ipteks dalam menyelesaikan masalah prosedural Jurnalistik, Humas, dan Komunikasi Pemasaran yang seluruhnya ada empat *item* keterampilan khusus.

Berbagai kompetensi lulusan yang dimasukkan dalam kurikulum tersebut kemudian terimplementasi pada berbagai mata kuliah, yang disusun dalam rangka menghasilkan profil lulusan yang akan berkiprah baik sebagai praktisi di bidang humas, jurnalistik, dan komunikasi pemasaran; peneliti atau analis di bidang humas, jurnalistik, dan komunikasi pemasaran; serta wirausahawan muda di bidang komunikasi, bidang humas, jurnalistik, dan komunikasi pemasaran.

Munculnya kebijakan MBKM dengan delapan program utamanya, yaitu: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar, peneliti, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi/proyek independen, dan desa binaan/kuliah kerja nyata (KKN), dipandang dapat menghambat ketercapaian LO dan profil lulusan yang diharapkan oleh Program Studi. Hal ini karena mahasiswa dibebaskan untuk memilih aktivitas yang bisa jadi “keluar” dari arah keilmuan program studi, yaitu humas, jurnalistik, dan komunikasi pemasaran. Desa binaan atau KKN, misalnya tidak memungkinkan bagi mahasiswa untuk menyerap ilmu atau pun mempraktekan ilmu berkaitan dengan humas, jurnalistik, dan komunikasi pemasaran. Begitu pula dengan proyek kemanusiaan: mahasiswa diberikan opsi untuk menjadi relawan dalam situasi bencana yang dialami masyarakat.

Pada implementasinya di Prodi S1 Ilmu Komunikasi Usahid Jakarta dalam dua semester berjalan, program MBKM memunculkan beragam respon dari pengelola Program Studi, dosen (pengajar mata kuliah), dan mahasiswa. Berbagai respon dari ketiga entitas Prodi tersebut terjadi karena adanya asimetris informasi yang mewarnai program tersebut. Dosen sebagai subjek sentral dari program MBKM, dalam pengamatan peneliti, memiliki beragam pandangan. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) memahami eksese dari implementasi kebijakan MBKM pada *learning outcome* prodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Sahid; (2) memahami pandangan dosen terkait kebijakan MBKM.

KERANGKA TEORI

Pembelajaran sebagaimana yang dikehendaki dalam program MBKM secara konseptual maupun praksis mencerminkan gagasan pendidikan yang dikemukakan oleh Paule Freire. Esensi dari pembelajaran MBKM menurut pandangan Freire terletak pada penempatan peserta didik sebagai subjek utama atas pembelajaran (Nanggala & Suryadi, 2021). Oleh karena peserta didik adalah subjek pembelajaran, maka mereka perlu diberikan hak-hak kemandirian dalam upaya melaksanakan proses pembelajaran dan menghabiskan waktu belajarnya. Paulo Freire menamai bentuk pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran itu dengan istilah “pendidikan pembebasan”.

Pendidikan pembebasan adalah sebuah gagasan besar yang dirumuskan oleh Paulo Freire, seorang teoritikus pendidikan dari Brasil. Ia memulai teorinya dengan mengkritik sistem pendidikan konvensional, yang disebutnya sebagai pendidikan “Gaya Bank”. Pendidikan gaya bank menempatkan anak didik sebagai objek yang pasif, tidak tau apa-apa. Dalam konteks ini, pendidik (guru dan dosen) dipandang sebagai orang yang paling tau, serba tau, dan hanya dia satu-satunya sumber pengetahuan. *Output* yang dihasilkan dari model pendidikan gaya bank tersebut tergantung dari pendidiknya (Manggeng, 2005).

Fokus pendidikan yang diperjuangkan oleh Freire melalui gagasannya itu adalah kaum tertindas. Menurut Freire, pendidikan gaya bank merupakan sistem yang menindas, oleh karenanya “kaum tertindas” harus dibebaskan dari belunggu sistem yang ada. Sistem pendidikan yang dialami oleh kaum tertindas menafikan sifat dialogis dalam proses pembelajaran. Wujudnya tidak hanya yang tampak tetapi juga beroperasi melalui sistem yang menempatkan peserta didik pada situasi yang tidak kritis atau tetap tertindas (Collin dalam Sudrajat & hambali, 2021).

Filsafat pendidikan pembebasan Freire berada pada aliran humanisme. Konsepsi pendidikan humanis Freire tersebut memiliki tiga ciri, yaitu: (1) pendidikan harus memiliki arah yang jelas dan tegas yaitu membebaskan dan memerdekakan; (2) pendidikan harus menjadi solusi bagi segala kehidupan sosial; (3) pendidikan emansipatoris yang menempatkan peserta didik sebagai subjek (Fadli, 2020).

Kebijakan Kurikulum MBKM

Landasan implementasi MBKM berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11 Permendikbud menyatakan: (1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam pelaksanaan kurikulum MBKM diperlukan kolaborasi yang matang sehingga implementasi kurikulum bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kurikulum MBKM kolaborasi antarperguruan tinggi harus betul-betul terlibat dalam penyiapan lulusan agar selaras dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode studi kasus berupaya menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan *why* dan *how*. Dalam hal ini, metode studi kasus yang digunakan bersifat *multiple case study* (desain kasus jamak). Yin (2002) menjelaskan, pendekatan “desain kasus jamak” ini berarti bahwa permasalahan yang diteliti secara umum memiliki kemiripan dengan kasus-kasus lainnya. Kurikulum adalah salah satu *case study* yang tentu saja banyak sekolah memilikinya. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan MBKM dilakukan oleh berbagai kampus, sehingga fokus studi di Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid secara umum memiliki kemiripan dengan program studi lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan upaya untuk memperoleh data kualitatif tentang pemaknaan atas suatu tema, yang diperoleh dari suatu kelompok (Bungin, 2007). Dalam konteks penelitian ini, FGD dilakukan untuk memperoleh data kualitatif terkait sudut pandang dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Jakarta, mengenai Dampak Kebijakan MBKM pada *Learning Outcome*.

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah dosen tetap prodi ilmu komunikasi yang ditetapkan sembilan orang dari 12 dosen yang ada. FGD berlangsung selama empat jam, dimulai dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.30 WIB di Hotel Haris Jakarta, pada 14 Desember 2021. Proses pelaksanaan FGD berlangsung secara eksploratif. Para partisipan yang ditetapkan sebagai narasumber diberi satu pertanyaan oleh moderator (fasilitator) yang kemudian dijawab secara bergilir oleh masing-masing narasumber. Dalam pelaksanaan FGD, bertindak sebagai moderator/fasilitator adalah wakil ketua Program Studi.



Gambar 1. Pelaksanaan Focus Group Discussion
Sumber: Dokumentasi Prodi Ilmu Komunikasi

Data hasil FGD dianalisis menggunakan pendekatan yang dikemukakan Creswell (Sugiyono & Lestari, 2021) yang langkah-langkahnya meliputi: (1) pengorganisasian dan persiapan data yang akan dianalisis. Tim peneliti mengumpulkan dan mengelompokan berbagai informasi dari narasumber (partisipan) baik yang diperoleh melalui notulensi tertulis maupun *video recording*; (2) membaca seluruh data yang terkumpul dan mempelajarinya, disamping menonton ulang video FGD; (3) melakukan pengkodean data jawaban para narasumber. Pengkodean disusun berdasarkan pertanyaan (dimensi penelitian) yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan kepada para narasumber; (4) Hasil koding dijadikan sebagai bahan deskripsi dengan menyusun tema-tema dari data yang ada dalam sebuah deksripsi; (5) menghubungkan antartema; (6) melakukan intepretasi atas makna dan tema yang ada.

HASIL PENELITIAN

Program MBKM adalah upaya yang ditempuh dalam rangka mendidik mahasiswa agar semakin profesional pada jurusan yang diminatinya, dengan cara mendekati mahasiswa dengan dunia industri. Kebijakan ini diharapkan akan meminimalisir ketidaksesuaian kompetensi lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan kualitas calon profesional yang dibutuhkan oleh industri.

Hasil FGD prodi ilmu komunikasi ini sesuai dengan tujuan kebijakan MBKM yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya (Kemdikbud, 2021).

Proyek Kemanusiaan dan Learning Outcome

Para partisan yang hadir menyatakan pandangannya bahwa program MBKM dapat memiliki dampak yang baik dalam mendukung terwujudnya *learning outcome* Prodi pada aspek perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus. Dalam ulasannya, mengenai pembentukan sikap, para lulusan mencontohkan tentang program proyek kemanusiaan. Mahasiswa yang menjalankan program ini tentu saja akan terbentuk sikap kepekaan sosialnya karena terlatih untuk berempati dengan sesama dan lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan poin keenam dari kompetensi sikap yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Usahid, yaitu: bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dengan kecenderungan sikap demikian maka lulusan telah menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, yang merupakan poin pertama kompetensi sikap yang harus dimiliki oleh lulusan Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam uraian lebih dalam, terkait dengan komponen sikap, partisipan HA menyampaikan setiap mata kuliah yang dia ajarkan selalu diselipkan komponen sikap seperti etika, misalnya larangan untuk *copy paste* tugas teman.

Pada tataran yang lebih luas, pelaksanaan proyek kemanusiaan juga sejalan dengan komponen sikap lain yang dirumuskan dalam kurikulum Prodi. Misalnya, pada peristiwa gempa bumi, tsunami, banjir, dan sebagainya. Ketika mahasiswa Ilmu Komunikasi menjadi tenaga bantuan pada keadaan tersebut, maka ada beragam kompetensi sikap lulusan Prodi Ilkom yang sudah dijalankan, seperti: menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika; berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; dan berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara;

Untuk aspek pengetahuan, melalui program pertukaran pelajar mahasiswa dapat memperoleh ilmu, baik yang sejalan dengan Prodi nya mau pun yang di luar Prodi nya. Dalam pandangan partisipan, kebebasan mahasiswa dalam memilih mata kuliah pada jurusan yang berbeda di Prodi yang sama, atau memilih mengikuti kelas mata kuliah pada Prodi yang berbeda dalam satu universitas, serta memilih mengikuti kelas pada mata kuliah dari Prodi yang berbeda dan pada universitas yang berbeda, akan memberikan pengayaan pengetahuan pada mahasiswa. Oleh karena pilihan mata kuliah diberikan kebebasan kepada mahasiswa, maka akan menumbuhkan minat yang tinggi pada mata kuliah tersebut. Hal ini karena kecenderungan yang muncul adalah pilihan mata kuliah mahasiswa didasarkan karena minatnya terhadap materi ilmu dari mata kuliah itu.

Program riset dan magang juga dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa. Mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan secara langsung dari industri, baik yang senada dengan Prodi maupun pengetahuan umum. Untuk program riset misalnya, pendalaman atas sebuah topik riset atau permasalahan tertentu dari mahasiswa yang mengikuti program ini akan membuat mereka kaya pada informasi lapangan. Begitu juga pengayaan pengetahuan tentang jurnalistik, humas, dan komunikasi pemasaran, akan diperoleh mahasiswa ketika mengikuti magang. Dari pengalaman selama ini, mahasiswa yang magang (sebelumnya diistilahkan sebagai Praktek Kerja Lapangan) di media massa, perusahaan swasta, maupun instansi negeri, selalu kembali dengan membawa pengetahuan terbaru yang sedang dipraktekkan saat itu. Adakalanya sesuai dengan teori yang diajarkan di dalam kelas, tetapi tidak sedikit juga merupakan pengetahuan baru tentang jurnalistik, humas, atau pun komunikasi pemasaran.

Aspek keterampilan umum dapat diperoleh mahasiswa dengan magang industri, serta praktek kerja yang dilaksanakan di perusahaan atau instansi pemerintahan guna mengasah dan mendapatkan langsung pengalaman di bidang jurnalistik, humas, dan komunikasi pemasaran. Program magang ini juga dapat meningkatkan keterampilan seperti fotografi, penguasaan kamera, membuat *press release*, *copywriting*, digital PR, dan lainnya.

MBKM dan Minimnya Informasi Dosen

Kendati setuju dan menilai positif kebijakan tentang MBKM, namun dosen maupun tenaga pendidik menyatakan mereka masih memiliki keterbatasan serta belum sepenuhnya mengetahui dan memahami sebagian besar kebijakan MBKM. Para dosen Prodi Ilmu Komunikasi belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai kebijakan MBKM. Pengetahuan yang dimiliki para dosen hanya bersumber dari sosialisasi dari pihak universitas.

Para dosen belum mengetahui berbagai aturan pelaksanaan MBKM, mulai dari capaian pembelajaran lulusan, masa studi yang ditempuh pada kebijakan MBKM, metode pembelajaran, hingga kompetensi yang harus dimiliki oleh para dosen dalam membimbing mahasiswa terkait kebijakan MBKM sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selain minimnya pengetahuan serta pemahaman para dosen, tenaga pendidik juga memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai birokrasi, dan panduan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendukung program MBKM. Mereka masih memerlukan bekal pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai kebijakan MBKM. Namun demikian, tenaga pendidik menyatakan siap mendukung keberlangsungan kebijakan MBKM di Fikom Universitas Sahid Jakarta.

Penyesuaian Kurikulum sebagai Suporting MBKM

Diperlukan adanya penyesuaian materi pendidikan, dan pengajaran yang diampu oleh para dosen dengan apa yang menjadi kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Dalam implementasi MBKM juga diperlukan adanya penyesuaian teori atau konsep yang diajarkan di Prodi sehingga mampu beradaptasi dengan fenomena yang dihadapi oleh mahasiswa saat mengikuti program kegiatan. Perlu pula diadakan peninjauan kurikulum untuk mensinkronisasikannya dengan tujuan pemberlakuan kebijakan MBKM. Strategi ini perlu untuk dilakukan mengingat dibutuhkan adanya rancangan baru dalam metode pengajaran yang adaptif serta menjawab tantangan MBKM.

Program Studi juga perlu menetapkan ketentuan, dan mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan delapan program-program MBKM, seperti magang atau praktik kerja, pertukaran mahasiswa, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata (KKN), asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan; serta penetapan terkait sistem penilaiannya. Upaya ini perlu ditempuh mengingat bentuk kegiatan MBKM sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya oleh Universitas Sahid yang dikenal sebagai praktek kerja lapangan.

Dukungan MBKM pada Kompetensi Lulusan

MBKM dapat mematangkan kompetensi mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, namun perlu ada petunjuk teknis berisi pengaturan dan penjelasan bobot satuan kredit semester (SKS) mata kuliah terkait dengan kegiatan yang dipilih dalam program MBKM. Strategi ini perlu dilakukan mengingat dari delapan program yang ditawarkan MBKM, sebagian besar mahasiswa meminati magang atau praktek kerja, dan program pertukaran mahasiswa.

Dalam studi survei kuantitatif yang dilakukan, diperoleh temuan sebagian besar mahasiswa menilai MBKM dapat memberikan kompetensi tambahan buat mereka. Namun tidak sedikit pula mahasiswa yang meragukan MBKM dapat memberikan kompetensi tambahan bagi mereka. Selain itu, mahasiswa juga beranggapan, peningkatan kompetensi tergantung dari mitra yang mendampinginya.

Meski kebijakan MBKM menganut filosofi kebebasan, namun perlu memiliki pembatasan yang bersifat akademik, seperti relasi indeks prestasi dengan hak SKS, dan mata kuliah yang diambil mahasiswa. Hal ini perlu dilakukan mengingat basis kompetensi mahasiswa adalah keilmuan komunikasi. Sehingga, bisa saja mahasiswa mengambil mata kuliah dari program studi yang berbeda, sebagai contoh mengambil mata kuliah kedokteran. Namun bukan berarti mahasiswa komunikasi harus menguasai ilmu bedah, atau anastesi. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lain hanya sebatas untuk penambahan pengetahuan serta pemahaman yang dapat dikombinasikan dengan keilmuan yang sedang ditekuni, yakni ilmu komunikasi.

Adanya kebijakan pertukaran mahasiswa, atau kemudahan untuk mengambil mata kuliah lintas keilmuan menjadikan universitas sudah sepatutnya menjalin dan memperluas jejaring dengan perguruan tinggi lain, dan juga dunia industri dalam rangka memfasilitasi fakultas dan Prodi Ilmu Komunikasi dalam rangka menyukseskan kebijakan MBKM.

Kejelasan Peran dan Posisi Dosen

Dalam penerapan kebijakan MBKM para dosen harus memiliki peran yang jelas, serta memiliki panduan dan mekanisme kerja yang baku. Perlu adanya Standar kerja atau SOP sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan sebab banyak mahasiswa yang belum mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dalam kegiatan MBKM. Selain itu, banyak pula mahasiswa yang mengaku sudah mempersiapkan diri namun bingung untuk ikut serta dalam kegiatan MBKM.

Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma yang dilakukan para dosen, perlu digalakkan kembali, sehingga dapat memunculkan kesesuaian antara wawasan keilmuan yang didapat melalui kampus, dengan penerapan aplikasinya di lapangan oleh mahasiswa. Di samping perlu adanya kesesuaian konsep capaian pembelajaran dengan MBKM, Prodi Ilmu Komunikasi juga perlu mempersiapkan mahasiswa dalam mencapai kesesuaian itu. Hal ini perlu dilakukan sebab banyak mahasiswa yang merasa ragu untuk merekomendasikan program MBKM di kepada kolega mereka.

Inilah perlunya dilakukan transfer pengalaman dari mahasiswa bimbingan, sehingga dosen di Prodi Ilmu Komunikasi dapat membimbing mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan, seperti magang. Sebab diketahui, mahasiswa seringkali mengeluhkan masa studi menjadi lebih lama dengan adanya kebijakan MBKM. Adanya kesinambungan antara dosen dengan mahasiswa bimbingannya dalam menerapkan kebijakan MBKM sebagaimana dijelaskan dalam model paradigma *Outcome Based Education* (OBE) yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, dengan istilah *Outcome Based Learning and Teaching* (OBLT). Pelaksanaan kegiatan pembelajaran didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.

Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa, wajib mengacu dan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Junaidi, 2020).

Sebenarnya, capaian pembelajaran lulusan yang disusun Prodi Ilmu Komunikasi sudah cukup mengakomodir dan mengarahkan mahasiswa untuk menjadi wirausahawan, profesional, akademisi, atau peneliti. Namun sayangnya, mahasiswa tidak memiliki antusiasme, dan menganggap kebijakan MBKM adalah biasa saja. Bahkan dosen yang sudah senior menyatakan, kebijakan MBKM sejatinya sudah pernah diterapkan, sehingga kebijakan MBKM saat ini hanya bentuk pengulangan saja.

Penguatan Fungsi Kelembagaan pada Implementasi MBKM

Program Studi Ilmu Komunikasi Usahid sejatinya wajib mendorong mahasiswa dari awal sampai akhir dengan melakukan pembimbingan dan mempersiapkan mahasiswa dalam proses implementasi MBKM. Lembaga dalam hal ini universitas, beserta seluruh unit-unit di dalamnya termasuk pada level fakultas, perlu terlibat dan berkomitmen kuat didukung oleh yayasan terhadap implementasi kebijakan MBKM.

Universitas dalam hal ini sebagai lembaga pengelola, harus memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan MBKM. Kampus diharapkan membuat keputusan-keputusan yang tepat dan pedoman yang jelas bagi Fakultas, Program studi, dan Tenaga Pendidik dalam pelaksanaan kebijakan MBKM. Secara berkala, kampus melalui unit penjaminan mutu, perlu melakukan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan dan perencanaan dalam melaksanakan kebijakan MBKM. Hal ini perlu dilakukan sebab kegiatan MBKM adalah juga terkait dengan pencapaian visi kewirausahaan Usahid seperti program magang, kewirausahaan, dan pertukaran mahasiswa.

Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dari berbagai macam bentuk media informasi yang memadai karena para dosen di Prodi Ilmu Komunikasi masih memiliki keterbatasan akan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan MBKM.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah: *Pertama*, program MBKM memiliki dampak yang baik dalam mendukung terwujudnya *learning outcome* Prodi Ilmu Komunikasi baik dalam aspek perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus. Untuk aspek kompetensi sikap, melalui program proyek kemanusiaan, mahasiswa dididik untuk memiliki empati dan kepekaan sosial yang baik, sebab mereka diharuskan terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial. Untuk aspek pengetahuan, melalui program pertukaran pelajar mahasiswa dapat memperoleh ilmu, baik yang sejalan dengan prodi mau pun di luar prodinya. Program riset dan magang juga dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa.

Aspek keterampilan umum dapat diperoleh mahasiswa dengan magang di industri serta praktek kerja yang dilaksanakan di perusahaan atau instansi pemerintahan guna mengasah dan mendapatkan pengalaman di bidang jurnalistik, humas, dan komunikasi pemasaran. Program magang ini juga dapat meningkatkan keterampilan seperti fotografi, mengoperasikan kamera, membuat *press release*, *copywriting*, digital PR, dan lainnya.

Kedua, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi mendukung penerapan MBKM namun mereka belum memahami posisi dan peran mereka karena minimnya informasi yang diterima terkait kebijakan ini. Hasil FGD menunjukkan, hampir semua partisipan belum mengetahui dan memahami secara utuh program MBKM. Hal ini membuat mereka bingung ketika ditanya mahasiswa. Informasi yang mereka peroleh sejauh ini, baik yang disampaikan oleh universitas maupun di media masa dan media sosial tidak lengkap.

Saran dari penelitian ini adalah: Untuk lebih memaksimalkan dukungan MBKM terhadap *learning outcome* perlu dilakukan penyesuaian pada kurikulum (distribusi mata kuliah) dan berbagai perangkat prosedur teknis. Penyegaraan aturan menyangkut petunjuk teknis pelaksanaan delapan program harus segera diadakan untuk memperlancar kerja-kerja Prodi dalam implementasi program MBKM. Berikutnya, pemerintah, melalui LLDikti Wilayah III, bersama lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan Prodi perlu membentuk gugus tugas untuk memaksimalkan proses komunikasi dan informasi program MBKM, kepada para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sehingga ada kesamaan pandang tentang program MBKM, termasuk juga meminta dukungan dari industri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa Perguruan Tinggi Swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Radja Grafindo Perkasa.
- Dirjen Dikti, Kemendikbud RI. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka*.
- Fadli, R.V. (2020). Tinjauan Filsafat Humanisme: Studi Pemikiran Paule Freire dalam Pendidikan. Reforma: *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(2).
- Junaidi, A. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. (2020). *Tujuan Kebijakan Merdeka Belajar*. Kemdikbud.go.id. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/tujuan>.
- Manggeng, M. (2005). Pendidikan yang Membebaskan Menurut Paulo Freire dan Relevansinya untuk Konteks Indonesia. *INTIM, Jurnal Teknologi Kontekstual*, 8.
- Nanggala, A & Suryadi, K. (2021), Kampus Merdeka dalam Perspektif Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire serta Perdebatan Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan John Dewey Vs Robert M. Hutchins. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2).
- Sudrajat, A & Hambali, R.A. (2021). Analisis Filsafat Paulo Freire Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 5(1).
- Sugiyono & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi: Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Ilmiah Internasional*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sopiyansah, M & Zakia (2022). Konsep dan Implementasi MBKM. *Jurnal Reslaj UIN Sunan Gunung Jati Bandung*.
- Yin, Robert K. (2002). *Case Study Research: Design and Methods* (Third edition). London, New Delhi: Sage Publication.